

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH KOTA BUKITTINGGI

Fitri Rahmadani¹, Yulia Ningsih², Rizan Hasbullah³

ftrrhmdh@gmail.com¹, yulianingsihumnyarsi@gmail.com², rizanhasbullah09@gmail.com³

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, dan data resmi dari wawancara dengan pihak terkait. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan sosial yang diwujudkan melalui berbagai program pemerintah, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Di Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi, pelaksanaan PKH menghadapi kendala seperti keterlambatan penyaluran bantuan dan ketidakakuratan dalam penentuan penerima manfaat. Banyak keluarga yang layak tidak terdaftar, sementara yang tidak memenuhi syarat tetap menerima bantuan. Hal ini diperparah karena kewenangan verifikasi data berada di pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kesulitan menyesuaikan data dengan kondisi nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan PKH dan mengidentifikasi hambatan utama melalui wawancara dengan penerima, fasilitator, dan pejabat terkait. Hasilnya menunjukkan jadwal penyaluran yang tidak konsisten dan data penerima yang tidak akurat sangat memengaruhi kesejahteraan keluarga miskin, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Temuan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait koordinasi antar instansi, akurasi data, dan transparansi penyaluran. Pemerintah daerah juga perlu diberikan kewenangan lebih besar dalam verifikasi data agar PKH dapat lebih efektif mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Efektivitas, Kemiskinan, Bantuan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

This study uses a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive methods conducted through a review of literature and official data from interviews with relevant parties. Community welfare is the main goal of social development, which is realized through various government programs, one of which is the Family Hope Program (PKH). PKH is a conditional social assistance program aimed at improving the quality of life of poor families by increasing access to education, health, and social services. In Aur Tajunggang Tengah Sawah Sub-district, Bukittinggi City, the implementation of PKH faces several challenges, such as delays in aid distribution and inaccuracies in determining aid recipients. Many eligible families are not registered, while those who do not meet the criteria continue to receive assistance. This issue is exacerbated by the fact that data verification authority lies with the central government, making it difficult for local governments to adjust the data to reflect actual conditions. This study aims to analyze the effectiveness of PKH implementation and identify the main obstacles through interviews with beneficiaries, facilitators, and relevant officials. The findings show that inconsistent distribution schedules and inaccurate recipient data significantly affect the welfare of poor families, particularly the elderly, persons with disabilities, and pregnant women. The results emphasize the need for a comprehensive evaluation regarding inter-agency coordination, data accuracy, and

transparency in distribution. Local governments also need to be granted greater authority in data verification so that PKH can more effectively alleviate poverty and sustainably improve community welfare.

Keywords: *Family Hope Program (PKH), Effectiveness, Poverty, Social Assistance, Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan nasional dan menjadi indikator keberhasilan negara dalam melaksanakan amanat konstitusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara baik material, spiritual, maupun sosial, sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri secara optimal. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kemiskinan tidak sekadar diartikan sebagai kekurangan pendapatan, melainkan juga mencakup keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Kemudian, tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pandangan terhadap sesuatu yang datang dari luar (Ningsih, 2021). Hal ini sesuai dengan ungkapan Rahmad (dalam Bila, 2023) bahwa kepercayaan dalam hubungan antar manusia adalah harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan perjanjian dan memberikan apa yang telah dijanjikan. Nugroho dalam Wulandari et al. (2020) menyatakan bahwa kemiskinan ditandai oleh rendahnya pendapatan yang tidak mencukupi standar hidup layak, sementara Djabar, Afriani, et al. (2022) menekankan bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14 persen, dengan garis kemiskinan Rp472.525 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,96 persen pengeluaran rumah tangga miskin digunakan untuk kebutuhan pangan, sehingga aspek non-pangan seperti pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Program ini terinspirasi dari keberhasilan conditional cash transfer di Brasil dan Meksiko, yang terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, PKH diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Program ini menargetkan rumah tangga sangat miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki anggota keluarga rentan, seperti ibu hamil/nifas, anak usia 0–6 tahun, anak usia sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas berat (Israwati, 2023). Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setiap tiga bulan sekali. Tujuan utama PKH adalah mendorong keluarga miskin untuk memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus memberikan jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Dengan pendekatan ini, PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku keluarga miskin (Wahyuni et al., 2023). Menyediakan pelayanan berkualitas dimulai dengan adanya petugas pelayanan yang berkualitas. Seperti yang dikatakan oleh (Assyahri & Bila, 2024), bahwasanya memberikan layanan publik yang berkualitas seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga pemerintahan.

Dalam kajian akademik, efektivitas program menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan sosial. Efektivitas diartikan sebagai sejauh mana tujuan

program dapat dicapai melalui kegiatan yang telah direncanakan (Sutrisno, 2007). Campbell dalam Wibowo (2016) menekankan bahwa efektivitas mencakup indikator keberhasilan program, kepuasan penerima manfaat, serta pencapaian sasaran. Mahmudin dalam Nurhidayati (2020) juga menegaskan bahwa semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program tersebut. Dengan demikian, efektivitas PKH tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau dana yang tersalurkan, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, seperti meningkatnya partisipasi sekolah, menurunnya angka gizi buruk, dan membaiknya akses kesehatan.

Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial, PKH melengkapi program lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sinergi antarprogram ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan sosial yang komprehensif. Lebih jauh, PKH berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama menghapus kemiskinan, tujuan ketiga menjamin kehidupan sehat, dan tujuan keempat menjamin pendidikan berkualitas. Dengan peran strategis tersebut, PKH menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (World Bank, 2006 dalam Wahyuni et al., 2023).

Namun demikian, dalam implementasinya di tingkat lokal, PKH menghadapi berbagai kendala. Studi lapangan di Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi, menemukan sejumlah permasalahan. Pertama, keterlambatan penyaluran bantuan yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan sering tertunda, sehingga penerima manfaat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat kelemahan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai basis penentuan penerima. Banyak keluarga yang tergolong mampu masih menerima bantuan, sementara keluarga miskin lainnya justru terabaikan. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sari, 2019).

Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam memperbaiki data penerima juga menjadi kendala serius. Karena sistem pendataan dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah seringkali tidak dapat segera menyesuaikan data ketika ada perubahan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Pendamping PKH yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan program juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain rasio pendamping dengan jumlah KPM yang tidak seimbang, keterbatasan kapasitas, serta rendahnya dukungan sarana dan prasarana. Bahkan, resistensi sosial dari sebagian penerima manfaat yang menganggap bantuan sebagai hak tanpa kewajiban juga memperburuk efektivitas program.

Secara keseluruhan, efektivitas PKH di tingkat lokal masih jauh dari optimal. Masalah ketepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, serta lemahnya peran pendamping menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan program. Padahal, PKH sejatinya dirancang bukan hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas PKH di Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar PKH benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Bukittinggi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena tujuan utama penelitian adalah memahami dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pada keluarga penerima manfaat di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang terjadi dalam implementasi PKH, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi memerlukan analisis mendalam terhadap realitas di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kota Bukittinggi, yang dipilih secara purposive karena wilayah ini memiliki jumlah keluarga penerima manfaat PKH cukup besar dan merepresentasikan permasalahan klasik dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan peran pendamping. Waktu penelitian berlangsung sejak bulan April hingga Juni 2021, bertepatan dengan periode penyaluran bantuan tahap pertama, sehingga peneliti dapat melakukan observasi langsung terkait proses pelaksanaan program.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu keluarga penerima manfaat PKH, pendamping PKH, serta aparat pemerintah kelurahan dan Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PKH dan pengetahuan yang relevan mengenai program. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa laporan pelaksanaan PKH, data resmi dari Kementerian Sosial, serta literatur terkait teori efektivitas program dan kebijakan perlindungan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika pelaksanaan PKH di lapangan, termasuk proses penyaluran bantuan dan interaksi antara pendamping dengan keluarga penerima manfaat. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman subjektif dan persepsi para informan mengenai efektivitas PKH. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data lapangan dengan informasi tertulis dari sumber resmi maupun arsip pemerintah.

Proses analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, sehingga hasil analisis benar-benar mencerminkan realitas lapangan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen resmi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai pelaksanaan PKH di lokasi penelitian. Triangulasi ini juga membantu meminimalisir bias peneliti sekaligus meningkatkan validitas temuan.

Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, baik dari sisi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi masukan berharga bagi pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat

lokal maupun nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Aur Tajungkgang Tengah Sawah Kota Bukittinggi

Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkgang Tengah Sawah Kota Bukittinggi dievaluasi berdasarkan indikator Sutrisno (dalam Fauziah et al., 2022), yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Data menunjukkan bahwa penerima PKH di kelurahan ini meningkat dari 75 keluarga pada tahun 2020 menjadi 265 keluarga pada tahun 2025, seiring dengan tingginya angka kemiskinan lokal sebesar 4,08% (BPS, 2024; Dinas Sosial, 2025).

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Aur Tajungkgang Tengah Sawah Kota Bukittinggi.

Tabel 1 Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan Di Kota Bukittinggi Dan Kelurahan Aur Tajungkgang Tengah Sawah

Tahun	Bukittinggi	Aur Tajungkgang Tengah Sawah
2020	1323	75
2021	1203	69
2022	2066	124
2023	2095	128
2024	2452	265
2025	2587	265

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi Diolah 2025

Dari table diatas dapat diketahui bahwa Kelurahan Aur Tajungkgang Tengah Sawah, yang terletak di Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam cakupan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Sumatera Barat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 7.352 jiwa, tingkat kemiskinan di kelurahan ini tercatat sebesar 4,08% pada tahun 2024 (BPS, 2024). Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi (2025), jumlah penerima bantuan PKH di wilayah Kota Bukittinggi dan khususnya di Kelurahan Aur Tajungkgang Tengah Sawah mengalami tren peningkatan yang signifikan selama enam tahun terakhir.

Dari sisi pemahaman program, meskipun sosialisasi rutin dilakukan melalui pertemuan kelompok bulanan oleh pendamping, banyak penerima manfaat yang masih belum menyadari bahwa bantuan bersifat bersyarat. Sebagian menganggap PKH sebagai kompensasi tanpa kewajiban, sehingga kewajiban seperti membawa anak ke posyandu atau memastikan kehadiran anak di sekolah sering diabaikan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi masyarakat. Pendamping berperan aktif memberi penjelasan, namun internalisasi pemahaman belum optimal.

Indikator ketepatan sasaran juga belum tercapai sepenuhnya. Sebagian keluarga yang sebenarnya sudah lebih sejahtera masih menerima bantuan, sementara keluarga miskin yang memenuhi kriteria justru tidak terdaftar dalam DTKS. Aparat kelurahan mengakui sekitar 80% sasaran sudah tepat, tetapi masih ada ketimpangan akibat perubahan kondisi ekonomi rumah tangga dan keterbatasan kewenangan daerah untuk memperbarui data. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial karena banyak warga merasa lebih layak tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Terkait ketepatan waktu penyaluran, pada umumnya penyaluran mengikuti jadwal dari pemerintah pusat, namun masih sering terjadi keterlambatan. Faktor penyebabnya antara lain kendala administratif, permasalahan teknis seperti sistem transfer dan dokumen tidak

lengkap, serta kebijakan politik menjelang pilkada atau pilpres yang menunda penyaluran bansos. Keterlambatan ini berdampak besar pada penerima, terutama lansia dan keluarga miskin, yang sangat bergantung pada dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Indikator pencapaian tujuan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima merasakan manfaat PKH, khususnya untuk pendidikan anak, kesehatan balita, kebutuhan lansia, dan keberlangsungan hidup sehari-hari. PKH terbukti membantu anak tetap bersekolah, ibu hamil dan balita mendapatkan layanan kesehatan, serta lansia memperoleh dukungan sosial. Namun, tujuan program belum sepenuhnya tercapai karena masih ada ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan penyaluran yang mengurangi efektivitasnya.

Terakhir, dalam hal perubahan nyata, PKH memberikan dampak positif bagi kesejahteraan penerima. Banyak keluarga mengaku lebih mudah membiayai sekolah anak, menjaga kesehatan balita, memenuhi kebutuhan pangan, bahkan meningkatkan kemandirian ekonomi. Namun, kendala klasik berupa distribusi bantuan yang tidak merata dan penggunaan dana yang tidak selalu sesuai aturan masih terjadi.

Jika dilihat dari indikator kesejahteraan menurut BPS (Baiq Dewi Kamariani et al., 2024), yaitu pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, PKH memberikan kontribusi nyata terutama pada peningkatan kesehatan dan pendidikan keluarga miskin. Dana bantuan banyak digunakan untuk imunisasi, posyandu, pembelian obat, serta biaya sekolah. Namun, hambatan berupa keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran masih mengurangi optimalisasi manfaat program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah cukup membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, tetapi efektivitasnya belum maksimal. Perlu perbaikan dalam pemahaman penerima, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta mekanisme pendataan dan pengawasan agar tujuan PKH dapat tercapai lebih merata dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, karena masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang secara langsung memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat. Faktor-faktor penghambat tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari persoalan pendataan yang tidak akurat, ketidaksinkronan data kependudukan dengan sistem administrasi resmi, hingga kelemahan sistem penetapan calon penerima bantuan yang dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Sosial. Selain itu, hambatan administratif dan teknis seperti proses verifikasi dan validasi yang berlarut-larut, kendala dalam sistem pencairan, serta kebijakan penundaan penyaluran pada momentum politik turut memperburuk situasi. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan keterlambatan penyaluran, ketidaktepatan sasaran, serta rendahnya kepastian penerimaan bantuan, yang semuanya berimplikasi pada menurunnya tingkat efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Pertama, terdapat masalah pendataan yang tidak akurat. Banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini menghambat proses perbaikan dan pengusulan data penerima bantuan. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Herman, SE (19/08/2025), menjelaskan bahwa sinkronisasi data kependudukan menjadi syarat utama agar data yang masuk ke sistem benar-benar valid.

Kedua, terdapat kendala pada sistem penetapan calon penerima bantuan oleh

Kementerian Sosial yang bersifat terpusat. Data calon penerima yang ditetapkan pusat kemudian diverifikasi di daerah, namun sering kali tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ibu Elsyi, S.Pt., Kasi Agsosbud Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah (19/08/2025), menegaskan bahwa masih banyak warga layak tidak terdata, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima. Hal ini menunjukkan adanya persoalan ketidaktepatan sasaran akibat kelemahan sistem pendataan nasional.

Ketiga, terdapat hambatan administrasi dan teknis yang memicu keterlambatan penyaluran dana. Berdasarkan keterangan Fadhli Ibnu Yesien, S.Pd., Koordinator PKH Kota Bukittinggi (19/08/2025), keterlambatan penyaluran disebabkan oleh lamanya proses verifikasi dan validasi data, perubahan kebijakan pusat, kendala teknis sistem pencairan, serta penundaan pada momentum politik (pemilu/pilkada) untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial.

Secara keseluruhan, faktor penghambat efektivitas PKH di kelurahan ini meliputi ketidaksinkronan data kependudukan, ketidaktepatan sasaran akibat sistem terpusat, serta kendala teknis dan administrasi dalam pencairan dana. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses penyaluran tidak selalu tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin belum optimal.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah Kota Bukittinggi tidak dapat dilepaskan dari sejumlah tolok ukur yang menjadi dasar evaluasi, yakni lima indikator utama yang lazim digunakan dalam menilai keberhasilan suatu program sosial. Indikator-indikator tersebut meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata. Kelima indikator ini saling berkaitan dan berfungsi sebagai parameter yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana program PKH mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin serta seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dengan menggunakan indikator tersebut, dapat diketahui tidak hanya aspek administratif dari jalannya program, tetapi juga implikasi langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi efektivitas PKH di wilayah ini tidak hanya berfokus pada jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan juga pada bagaimana pemahaman peserta, ketepatan penerima, ketepatan waktu distribusi, keberhasilan mencapai tujuan program, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Pertama, dari sisi pemahaman program, meskipun pendamping PKH telah rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan bulanan, banyak penerima manfaat masih belum memahami bahwa bantuan bersifat bersyarat. Mereka kerap menganggap PKH sebagai kompensasi pemerintah tanpa kewajiban, sehingga kewajiban seperti membawa anak ke posyandu atau memastikan kehadiran anak di sekolah tidak sepenuhnya dijalankan. Hal ini dipengaruhi rendahnya literasi, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Teori komunikasi pembangunan Everett Rogers (1983) dan Street-Level Bureaucracy Lipsky (1980) relevan di sini, karena menekankan pentingnya kesesuaian pesan dengan konteks sosial serta peran pendamping dalam implementasi kebijakan.

Kedua, terkait ketepatan sasaran, masih ditemukan penerima yang secara ekonomi sudah lebih baik tetapi tetap mendapat bantuan, sementara keluarga miskin yang seharusnya berhak justru tidak terdata. Proses verifikasi dan validasi yang terpusat di Kementerian Sosial serta perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis memperburuk ketidaktepatan data. Dampaknya, distribusi bantuan menjadi tidak adil, menimbulkan

kecemburuan sosial, dan berpotensi memperlebar kesenjangan. Menurut Sutrisno (dalam Fauziah et al., 2022), ketepatan sasaran merupakan indikator penting efektivitas, sementara Marzuki (2019) dan Nugroho (2020) menegaskan bahwa lemahnya akurasi data dan terbatasnya kewenangan daerah menjadi kelemahan utama program bantuan sosial di Indonesia.

Ketiga, dalam hal ketepatan waktu penyaluran, program PKH berusaha mengikuti jadwal pusat, namun keterlambatan masih sering terjadi. Penyebabnya meliputi proses administrasi yang panjang, kendala teknis sistem transfer, dokumen tidak lengkap, serta kebijakan penundaan penyaluran menjelang pemilu untuk menghindari politisasi bansos. Keterlambatan ini berdampak langsung pada penerima, karena bantuan yang seharusnya untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan anak, gizi balita, atau perawatan lansia menjadi tertunda. Sesuai pandangan Sutrisno (dalam Fauziah et al., 2022) dan Marzuki (2019), ketepatan waktu merupakan pilar efektivitas, sementara Nugroho (2020) menilai lemahnya koordinasi dan ketidakakuratan data menjadi faktor penghambat distribusi tepat waktu.

Keempat, dari indikator pencapaian tujuan, sebagian besar penerima manfaat merasa bahwa PKH sudah membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan anak, kesehatan balita, serta mendukung kemandirian lansia. Banyak keluarga miskin di kelurahan ini terbantu secara nyata sehingga anak tetap bersekolah, balita memperoleh layanan kesehatan, dan lansia dapat memenuhi kebutuhan pokok. Namun, tujuan program belum tercapai sepenuhnya karena masih ada keterlambatan pencairan dan ketidaktepatan sasaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2020) yang menekankan pentingnya validitas data dan ketepatan distribusi, serta Marzuki (2019) yang menilai keberhasilan program dari sejauh mana kondisi sosial-ekonomi penerima benar-benar membaik.

Kelima, dari sisi perubahan nyata, PKH terbukti memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Banyak penerima menyatakan lebih mudah membiayai pendidikan anak, mengakses layanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan harian. PKH juga mendukung kemandirian lansia dan keluarga miskin. Namun, masalah keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran masih mengurangi efektivitas program. Pendapat Nugroho (2011) dan Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa efektivitas program sosial diukur dari sejauh mana mampu memenuhi kebutuhan dasar, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah sudah membawa manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Akan tetapi, efektivitasnya belum maksimal karena terkendala oleh lemahnya pemahaman penerima, ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, serta masalah validitas data. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan penguatan strategi sosialisasi, perbaikan sistem pendataan, kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam pemutakhiran data, serta peningkatan koordinasi lintas sektor agar bantuan benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan karena dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas program. Faktor-faktor penghambat ini muncul dalam bentuk ketidakakuratan data kependudukan, keterbatasan sistem penetapan penerima yang dilakukan secara terpusat, serta kendala administratif dan teknis dalam proses verifikasi, validasi, maupun penyaluran bantuan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan dana, hingga terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat miskin yang menjadi target utama program. Dengan kata lain, meskipun PKH dirancang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, berbagai hambatan di tingkat pelaksanaan membuat tujuan tersebut tidak tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, tata kelola distribusi, serta koordinasi antarinstansi, agar program dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima manfaat di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bahwa program ini secara umum telah berjalan dengan baik dalam hal sosialisasi dan pemahaman peserta terhadap tujuan dan mekanisme bantuan. Namun, efektivitas pelaksanaan PKH masih mengalami kendala signifikan yang mempengaruhi pencapaian hasil optimal, seperti ketidaktepatan sasaran akibat data yang tidak sinkron dan sistem penetapan penerima yang kurang akurat, serta keterlambatan penyaluran dana yang berdampak pada penggunaan bantuan yang tidak optimal. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan dalam pendataan, koordinasi antarinstansi, dan pengelolaan proses penyaluran dana agar bantuan dapat diterima tepat waktu dan sesuai kebutuhan penerima. Dengan demikian, PKH dapat lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah menghadapi kendala utama berupa ketidaksinkronan data, penetapan penerima yang kurang tepat sasaran, serta keterlambatan penyaluran dana. Hambatan ini mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pendataan, koordinasi antarinstansi, dan manajemen penyaluran agar bantuan dapat tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga manfaat PKH bagi keluarga miskin dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyahri, M., & Bila, M. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–56.
- Baiq Dewi Kamariani, I., dkk. (2024). Indikator kesejahteraan masyarakat: Analisis pendapatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(2), 101–115.
- BPS. (2021). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2021. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). Data kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2024. Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi.
- Campbell, J. P. (dalam Wibowo, U. B.). (2016). Efektivitas program sosial dan kepuasan penerima manfaat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 12–23.
- Djabar, M., Afriani, L., dkk. (2022). Kemiskinan dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan pokok. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 55–67.
- Fauziah, N., Rahayu, S., & Lestari, D. (2022). Efektivitas program sosial berbasis keluarga di Indonesia. *Jurnal Administrasi Sosial*, 14(2), 88–99.
- Israwati. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 34–47.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Marzuki. (2019). Evaluasi ketepatan sasaran bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 10(2), 99–110.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage

Publications.

- Ningsih, R. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap cara pandang masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 9(1), 77–85.
- Nugroho, R. (2011). *Kebijakan publik di negara berkembang*. Jakarta: Elex Media.
- Nugroho, R. (2020). Masalah ketepatan sasaran bantuan sosial di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kesejahteraan*, 18(3), 145–157.
- Nurhidayati. (2020). Efektivitas organisasi dan program: Kajian teori Mahmudin. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 65–74.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed.). New York: Free Press.
- Sari, D. (2019). Ketidaktepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Jurnal Sosialita*, 5(1), 22–31.
- Sutrisno. (2007). *Manajemen program pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, S., Putri, A., & Rahmawati, T. (2023). Peran Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(2), 77–89.
- Wulandari, S., dkk. (2020). Kemiskinan dan problem sosial di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 99–112.
- World Bank. (2006). *Making the New Indonesia work for the poor*. Washington DC: The World Bank.